

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Paripurnakan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2024



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/08/09/IMG_20240809_115231.jpg.webp

DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan memparipurnakan laporan akhir fraksi fraksi terhadap satu buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD perubahan tahun anggaran 2024.

" Semua fraksi menyetujui APBD perubahan untuk dijadikan Perda," kata ketua DPRD Syairi Mukhlis, di Kotabaru, Jumat.

Ketua DPRD menyampaikan, APBD perubahan tahun 2024 disepakati untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) dengan beberapa catatan dan masukan.

Pandangan fraksi terdapat beberapa catatan diantaranya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah yang di sampaikan Partai Hatinurani Masyarakat Edriansah.

Sementara itu fraksi Partai Amanat Nasional memandang perlunya pengawasan semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan APBD perubahan agar tetap sasaran dalam implementasinya.

Partai kebangkitan bangsa (PKB) meminta kepada pemerintah Daerah untuk menyediakan angkutan bus ASN menuju perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai di pemerintahan setempat.

" Beberapa catatan dan pandangan tersebut agar mampu di terapkan dengan baik, " ujar Syairi.

Ia berharap Pemerintah Daerah dapat mengemban dan menjalankan APBD perubahan untuk kemajuan masyarakat Kotabaru.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa DPRD Kabupaten Kotabaru menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 dalam rapat paripurna.

Menariknya nilai APBD Perubahan 2024 mengalami peningkatan tajam jika dibandingkan dengan APBD murni, yakni mencapai Rp 4,1 triliun.

"Ada perubahan yang lumayan signifikan, kurang lebih hampir Rp 1 triliun," ujar Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis.

Syairi mengatakan lonjakan itu tak terlepas dari naiknya pendapatan, terutama dari dana TDF dengan nilai mencapai Rp 750 miliar. Kemudian ditambah lagi dengan dana bagi hasil dan juga ada kenaikan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, kata dia, kenaikan APBD ini akan dialokasikan untuk membiayai berbagai perbaikan infrastruktur, terutama jalan. Adapun ruas jalan yang menjadi prioritas yakni jalan lingkar Pulau Laut dan jalan-jalan di daratan Pulau Kalimantan.

"Kemudian juga terkait dengan perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terutama pelayanan dasar dan penanganan stunting," tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad mengucapkan terima kasih atas pembahasan yang telah dilakukan sehingga akhirnya APBD Perubahan 2024 dapat disahkan.

Pihaknya juga mengapresiasi saran dan masukan yang diberikan seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kotabaru dalam rapat paripurna.

"Segala kritik dan evaluasi akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan di masa datang," katanya.

Adapun APBD Perubahan 2024 yang telah disahkan akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan evaluasi.

Evaluasi ini bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek teknis, material dan legalitas.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/424315/dprd-kotabaru-paripurnakan-raperda-apbd-perubahan-2024>, DPRD Kotabaru paripurnakan Raperda APBD Perubahan 2024, (09/08/2024).
2. <https://www.borneotrend.com/2024/08/disetujui-dprd-kotabaru-apbd-perubahan.html>, Disetujui DPRD Kotabaru, APBD Perubahan 2024 Meningkatkan Jadi Rp 4,1 Triliun, (14/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.

- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa